

## Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Yuyun Nur Anisafitri<sup>1</sup>, Masrul Ikhsan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: [yuyun.nur5173@student.unri.ac.id](mailto:yuyun.nur5173@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id](mailto:masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Peningkatan banjir yang sangat signifikan terjadi di Kecamatan Bangko pada tahun 2024 terakhir. Banjir di kecamatan bangko sudah menjadi permasalahan tahunan yang cukup serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanganan Banjir serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Duncan Efektivitas Organisasi dengan tiga indikator yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir dalam penanganan banjir sudah efektif pada program pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung kesungai. Mereka merancang dan melaksanakan program drainase yang mencakup pembangunan saluran drainase baru, rehabilitasi drainase yang rusak, serta pemeliharaan berkala. Program ini bertujuan untuk mengalirkan air dengan lebih efektif ke sungai, mengurangi genangan, dan mengatasi masalah banjir. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penyelenggaraannya adalah Kondisi geografis, Keterbatasan Anggaran, dan Kurangnya kesadaran masyarakat.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Banjir, Penanganan Banjir*

### Abstract

A very significant increase in flooding occurred in Bangko District in 2024. Flooding in Bangko District has become a fairly serious annual problem. This study aims to analyze and describe the effectiveness of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) in Flood Management and identify inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study uses Duncan's theory of Organizational Effectiveness with three indicators, namely Goal Achievement, Integration, Adaptation. The results of the study explain that the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Rokan Hilir Regency in handling floods has been effective in the drainage system management program that is directly connected to the river. They design and implement a drainage program that includes the construction of new drainage channels, rehabilitation of damaged drainage, and periodic maintenance. This program aims to drain water more effectively into rivers, reduce puddles, and overcome flood problems. However, there are several inhibiting factors in the implementation process, namely geographical conditions, budget limitations, and lack of public awareness.

**Keywords :** *Effectiveness, Flood , Flood Management*

### PENDAHULUAN

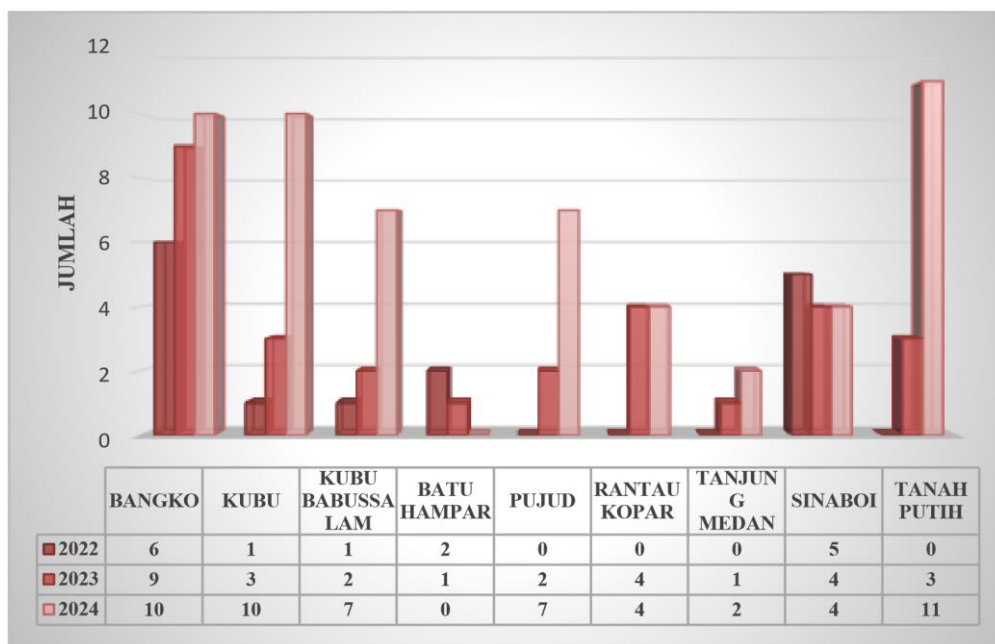
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sering kali mengalami bencana banjir. Banjir sering kali terjadi di wilayah pemukiman, persawahan, jalan, dan lainnya. Banjir dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk curah hujan yang tinggi, kondisi sungai yang rusak, dan pelanggaran tata ruang wilayah. faktor manusia juga memainkan peran penting, seperti

penebangan hutan, perubahan daerah resapan menjadi daerah pemukiman, dan kurangnya perawatan sistem drainase. umumnya banjir terjadi ketika curah hujan yang tinggi menyebabkan air meluap dari sungai atau kanal saluran aliran yang tidak bisa terserap oleh tanah. selain curah hujan yang terlalu tinggi banjir juga bisa terjadi karena naiknya permukaan air laut.

Menurut Yulaelawati & Shihab dalam (Alliyu, 2023) Ada tiga faktor yang menyebabkan bencana banjir yaitu: Pertama, faktor aktivitas manusia, seperti pemanfaatan dataran banjir untuk pemukiman dan industri, penggundulan hutan dan kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan. Kedua, faktor alam yang bersifat tetap seperti kondisi geografis yang berada pada daerah yang sering terkena badai, kondisi topografi yang cekung yang merupakan dataran banjir, kondisi alur sungai yang kemiringan dasar sungainya datar. Ketiga, faktor alam yang bersifat dinamis seperti curah hujan yang tinggi, terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar, penurunan muka tanah atau amblesan, pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi.

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian dasar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 100 meter di atas permukaan laut. Pada daerah pesisir pantai memiliki ketinggian antara 0 s/d 6 meter dpl dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir termasuk wilayah rawan banjir di Provinsi Riau dikarenakan Kabupaten Rokan Hilir dilalui oleh 4 (empat) aliran sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Kubu, Sungai Bangko dan Sungai Sinaboi, serta topografi wilayah yang datar dengan rata-rata ketinggian 5 mdpl.

Permasalahan yang terjadi Di Kabupaten Rokan Hilir ini masih adanya banjir di beberapa titik banjir kecamatan yang terjadi dari tahun 2022-2024 ditunjukkan melalui Gambar 1.1 sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Grafik Data Titik Banjir tahun 2022-2024 Kabupaten Rokan Hilir**  
 Sumber: Dokumen Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir 2024

Dari Gambar 1.1 di atas terlihat jumlah titik banjir di beberapa kecamatan Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2022-2024 yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan banjir yang sangat signifikan terjadi di Kecamatan Bangko yaitu sebanyak 55 titik Lokasi yang terendam banjir pada tahun 2024 terakhir. Hal ini dikarenakan kecamatan bangko merupakan ibukota dari Kabupaten Rokan Hilir di mana penduduknya yang lebih padat dan juga sebagai pusat perdagangan disana. Banjir di kecamatan bangko sudah menjadi permasalahan tahunan yang serius. Saat musim penghujan dengan durasi yang lumayan lama membuat parit penuh dan tidak

dapat menampung besarnya volume air. Akibatnya air meluap memenuhi perkarangan rumah warga. Ketinggian air mencapai 50-150 cm sehingga akses jalan terganggu. Banjir yang melanda sebagian besar ibukota kecamatan ini membuat aktivitas masyarakat terkendala dan banyak juga terjadi kerusakan. Adapun peasalahan lain yang terjadi yaitu penyumbatan Saluran Drainase di akibatkan endapan lumpur air pasang laut yang naik tinggi, Infrastruktur drainase yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan banjir dan gangguan aliran air, Dan wilayah Kecamatan Bangko merupakan dataran rendah membuat area yang rentan terhadap banjir karena air mudah menggenang dan tidak cepat mengalir. ada beberapa data kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir selengkapnya di Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2 Data kerusakan akibat bencana banjir di Kecamatan Bangko**

| No | Jenis Kerusakan | Unit/ Jumlah | Keterangan  |
|----|-----------------|--------------|---|
| 1  | Rumah           | 9825         | Rumah warga terendam banjir, tinggi permukaan air banjir 50-150 cm  |
| 2  | Fasilitas Umum  | 78           | Mesjid, Musholla, Sekolah, Pondok Pesantren, Kantor Penghulu, Rumah Suluk, Pasar, Posyandu, Putsu, TPU, WC umum, Box Cover, Excavator |
| 3  | Kendaraan       | 4            | Mobil, Bus, Truk  |
| 4  | Lahan           | 2.824 ha     | Lahan kebun sawit dan tana man padi habis terendam ba njir  |
| 5  | Jalan           | -            | Akses jalan terganggu 300-1.500 meter   |

Sumber: Dokumen Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir 2024

Dari Tabel 1.2 terdapat bahwa banyaknya data kerusakan akibat bencana banjir di Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan peningkatan sarana dan prasarana dalam mengatasi permasalahan banjir tersebut.

Adapun Langkah yang dilakukan yang mempunyai kebijakan yaitu Dinas PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan kontruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari sarana dan prasarana drainase perkotaan. Dalam peraturan ini drainase perkotaan didesain sebagai drainase ramah lingkungan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat dan bebas genangan. Serta untuk meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air. Oleh sebab itu, terkait Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi banjir yaitu membuat program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota. bentuk dari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tersebut yaitu dengan mengadakan Pembangunan Sistem Drainase Berkala dan Pemeliharaan serta Pemantauan. Pembangunan drainase berkala oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir dilakukan secara bertahap sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Lalu melakukan pemeliharaan yang terbagi atas 2 macam yaitu pemeliharaan rutin dan berkala, dalam pemeliharaan rutin Dinas PUPR melakukan pengerukan sedimen dan sampah, Dalam melakukan pemeliharaan rutin ini Dinas melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkolaborasi menormalisasikan drainase dalam penanggulangan banjir di beberapa kawasan di Kabupaten Rokan Hilir salah satunya di Kecamatan Bangko yaitu Kemudian melakukan pemantauan untuk mengetahui kinerja sistem drainase dalam mengatasi banjir.

Menurut Gibson dalam (Rifqah Ramdhana Jufri, 2024) efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif. Untuk mengukur efektivitas menggunakan teori Duncan dalam (Nurmalasari & Supriyadi, 2020) bahwa tingkat efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan data yang ditemui dilapangan oleh peneliti bahwa banyak wilayah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami banjir bahkan terjadi peningkatan menandakan bahwa pembangunan dan pengelolaan sektor drainasenya yang belum optimal, seperti terjadinya sedimentasi pada saluran drainase dan kerusakan infrastrukturnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Bangko kabupaten di Rokan Hilir tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum dengan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian “ Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”.

## **METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Penelitian ini dilakukan Kecamatan Bangko tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir selaku unsur SKPD di Pemerintah Daerah serta beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin peneliti teliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Sumber data yang dilakukan oleh peneliti ada 2 yaitu data primer diperoleh dari informan penelitian melalui wawancara secara langsung terkait Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan juga faktor penghambatnya. sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang ada berupa okumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip resmi. bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir seperti data Sungai Kabupaten Rokan Hilir, data banjir di kabupaten Rokan Hilir beserta data pendukung lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan oleh peneliti yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang Efektivitas (Nurmalasari & Supriyadi, 2020) ada 3 indikator menurut duncan dalam yang akan diukur yaitu sebagai berikut:

### **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan ialah melihat pencapaian tujuan perlu dipelihara dengan baik, agar pencapaian tujuan dari sebuah program yang dibuat bisa berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hermanto S.Ip.,M.Si selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Yang jelasnya drainase itu kan dalam pengertiannya merupakan suatu bangunan air baik permanen maupun semi permanen yang berfungsi untuk melimpahkan air dari satu lokasi dialirkan, sehingga lokasi yang tadi nya tidak tergenang. Jadi tujuan kami membuat program ini dengan membangun drainase ini memang untuk mengalirkan air, Baik air dari

limbah rumah tangga maupun air dari hujan ketempat titik kumpul nya. Supaya juga daerah nya tidak banjir dan lingkungannya lebih sehat, karena semua air limbah yang kotor itu akan masuknya ke drainase dan itu harus dibuang” (**Wawancara, 14 Oktober 2024**)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama informan penelitian terkait indikator pencapaian tujuan bahwasannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir telah merancang dan merencanakan sebuah program untuk pengendalian banjir yaitu pengelolaan sistem drainase yang langsung terhubung ke sungai di kecamatan bangko, tidak hanya di kecamatan bangko namun seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Yang dimana saluran drainase tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari satu titik ketitik pembuangannya yaitu sungai. Adapun bentuk Program Pengelolaan Sistem Drainase yang langsung terhubung kesungai yaitu melakukan pembangunan drainase yang baru dan merehabilitasi drainase yang sudah rusak. Pada program tersebut terdapat kegiatan Pemeliharaan seperti melakukan pembersihan rutin ataupun berkala dan merehabilitasi drainase yang mengalami kerusakan. Namun untuk drainase yang sifatnya alami dengan kata lain belum ada bangunan permanennnya mereka hanya melalukan pendalaman dan pengangkutan sampah-sampah keatas.

### **Integrasi**

Integrasi merupakan tolak ukur terhadap Tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis bersama informan penelitian mengenai koordonasi antar instansi di Kabupaten Rokan Hilir dalam penanganan banjir bersama Bapak Satriyo Wardani S.T.,M.Si selaku Tenaga Pengelola Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Tidak hanya dengan dinas lingkungan hidup dan BPBD kita juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan yang dimana sekarang banyak penyakit malaria dan juga BPBD yang diakibatkan oleh nyamuk akibat dari adanya cekungan air kotor dan juga dari gorong-gorong tersebut. Dan untuk sosialisasi atau himbauan secara resminya kepada masyarakat kami tidak ada, namun mungkin dinas lainnya ada seperti dinas lingkungan hidup. Karena mereka lebih spesifikasi terhadap kebersihan lingkungan. Jadi yang untuk lebih mensosialisasikan bukan Dinas PU tapi bisa dari bagian Humas Pemda atau bagian dari Dinas Kesehatan yang lebih aware atau bisa mungkin dari pihak kecamatan atau kelurahan-kelurahann yang bekerja sama dengan RT dan RW” (**wawancara, 14 Oktober 2024**)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama informan penelitian terkait indikator integrasi bahwasannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan program pengelolaan sistem drainase dalam pengendalian banjir itu bekerja dengan sendirinya. Mereka melakukan koordinasi ataupun kolaborasi kepada beberapa organiasi/ instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polisi, Satpol PP, dan juga Damkar. Dalam penanganan banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai komando, koordinasi dan pelaksananya. Kegiatan mitigasi yang dilakukan adalah pembersihan drainase dan penggalian sungai. Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan alat berat dan sarana kebersihan lainnya untuk pembersihan drainase dan sungainya.

### **Adaptasi**

Adaptasi merupakan kemampuan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir agar dapat memenuhi dan mengembangkan kemampuan sistem drainase supaya bisa beradaptasi dengan baik agar bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan cuaca dan kondisi lainnya. Berikut adalah hasil wawancara terkait adaptasi bersama ibu Retno Wulandari S.Ip selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Kami telah melaksanakan kegiatan pembangunan sistem saluran drainase perkotaan yang sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi dan tepat waktu. Ini mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terkait langsung dengan kondisi geografis. Tapi kembali lagi kondisi geografis dikecamatan bangko ini dekat dengan sungai banyak faktor yang mempengaruhi. Karna ada sistem drainase yang jauh dari titik pembuangannya yaitu sungai membuat itu perlu tahapan yang lama. Jika kami buka pintu air dari sungai kemungkinan hewan melata akan naik pada saluran drainase. Contohnya saat ini banyak ditemui buaya yang masuk ke permukiman warga bahkan sampai masuk kedalam rumah.”  
**(Wawancara, 14 Oktober 2024)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama informan penelitian terkait indikator Adaptasi bahwasannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam memenuhi dan mengembangkan sistem drainase Telah melaksanakan kegiatan pembangunan sistem saluran drainase perkotaan yang sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi dan tepat waktu. Ini mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terkait langsung dengan kondisi geografis. Serta melakukan upaya yang kompherenshif dengan melakukan pembersihan rutin, perbaikan infrastruktur, dan penggunaan teknologi untuk memprediksi dan mengantisipasi banjir. Untuk masalah kondisi geografis yang dimana kecamatan bangko ini dekat dengan sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendalaman sungai agar air dari drainase dapat mengalir kesungai. Dan mengantisipasi tidak terjadi penyumbatan di saluran tersebut.

### **Faktor-faktor penghambat pada Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Adapun faktor-faktor penghambat pada efektivitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ialah sebagai berikut:

#### **a) Dampak Lingkungan Dan Kondisi Geografis**

Dampak Lingkungan dan Kondisi geografis di kecamatan bangko ini menjadi faktor utama dalam menghambat efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penanganan banjir. Dimana dampak lingkungan pembangunan yang tidak terencana, penebangan hutan, dan perubahan penggunaan lahan dapat mengurangi kemampuan drainase dalam meningkatkan aliran air kepermukaan. Serta kondisi geografis kecamatan bangko ini memiliki daerah resapan dan tanah yang memiliki daya serap air yang rendah cenderung mengalami genangan, ini membuat sistem drainase sulit berfungsi secara optimal.

Berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Hermanto S.Ip., M.Si selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Kalau hambatannya yang utama yaitu pada kondisi wilayah kecamatan bangko ini ya karna kita memiliki dataran rendah dan dekat dengan sungai. Jadi air pasang sungai yang naik membuat drainase disini menjadi tersumbat soalnya kami sudah memberikan upaya sebaik mungkin agar drainase dapat berfungsi dengan baik namun melihat kondisi kita yang tidak bisa berkontribusi dengan baik pada sistem drainase yang kami bangun ini menyebabkan kendala bagi kami dalam mengatasi banjir yang terjadi di kecamatan bangko.” **(Wawancara, 14 Oktober 2024)**

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan utama yang hadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penanganan banjir di Kecamatan Bangko terkait dengan kondisi geografis wilayah ini, yang berada di dataran rendah dan dekat dengan sungai. Air pasang yang terjadi di sungai menyebabkan debit air meningkat, sehingga drainase yang ada menjadi tersumbat. Meskipun telah melakukan berbagai upaya sebaik mungkin untuk memastikan sistem drainase dapat berfungsi dengan optimal, kondisi alam yang dihadapi menghambat efektivitas sistem tersebut. Terutama, karena tidak dapat sepenuhnya mengendalikan faktor-faktor eksternal seperti pasang surut air sungai yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas drainase. Akibatnya, mengalami kendala besar dalam mengatasi

banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Bangko, meskipun sudah ada upaya perbaikan yang dilakukan pada infrastruktur drainase yang ada.

**b) Keterbatasan Anggaran**

Anggaran dana pembangunan adalah rencana keuangan yang merinci sumber dan penggunaan dana untuk proyek pembangunan infrastruktur, layanan publik, atau program-program pemerintah. Permasalahan yang terjadi ialah keterbatasan anggaran dimana Dinas PUPR dalaam melaksanakan pembangunan drainase masih kekurangan anggaran sehingga pembangunannya secara bertahap. Berikut adalah wawancara bersama ibu Retno Wulandari S.Ip selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Untuk kendala ya pada anggarannya, karna kita disini tentunya banyak dana yang dibutuhkan dalam proses baik itu pembangunan awal, merehab yang sudah rusak dan masi banyak juga belum ada drainase dikecamatan bangko ini. Kalau untuk anggaran biaya, detailnya kita belum bisa menghitung berapanya karena untuk menghitung sistem drainase yang terintegrasi secara total benar-benar harus dihitung detail harus ada perencanaan khusus. Karena drainase ini kan beda-beda, ada wilayah a ada wilayah b dan itu bisa berbeda maka dari itu butuh anggaran dana yang cukup besar dan kita keterbasan pada anggaran tersebut.” **(Wawancara, 14 Oktober 2024)**

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat pada efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko Dalam penanganan banjir di kecamatan bangko salah satunya adalah anggaran dana yang dibutuhkan. Karena pembangunan sistem drainase bangunan baru dan merehabilitasi drainase yang sudah rusak membutuhkan dana yang cukup besar. Maka dari itu tidak optimal nya sistem drainase di kecamatan bangko diakibatkan anggaran dana yang kurang memadai. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan drainase yang menyeluruh dan sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah, diperlukan anggaran yang cukup besar, yang saat ini masih terbatas.

**c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sistem drainase ini sangat diperlukan. Hal tersebut sangat mempengaruhi efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko. Karena dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pihak pemerintah dalam pemeliharaan sistem drainase di kecamatan bangko. Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Satriyo Wardani S.T.,M.Si selaku Tenaga Pengelola Teknis Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Kalau untuk kendala atau faktor penghambatnya salah satunya dianggaran lalu keduanya pembangunan yang sudah jadi itu dimasyarakat lagi intinya kebiasaan masyarakat. Jadi butuh partisipasi masyarakat untuk bisa menjaga drainase itu dalam kondisi yang baik. Dengan adanya perilaku negatif dari masyarakat seperti membuang sampah itu bisa memperparah kondisi drainase untuk mengalir. Dan juga keamanan masyarakat dimana pengaruh pasang surut sangat berbahaya anggap saja jika kita buka semua saluran baru kesungai sekarang buaya sudah masuk kedalam bahkan sudah sampai masuk kedalam rumah warga.” **(Wawancara, 14 Oktober 2024)**

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat pada efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Bangko yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta pada pemeliharaan sistem drainase dan masih banyak ditemui perilaku negatif masyarakat terhadap sistem drainase di kecamatan bangko. Hal-hal tersebut terjadi karna kurangnya edukasi, banyak warga yang tidak memahami pentingnya drainase dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Beberapa masyarakat mungkin menganggap pemeliharaan drainase bukanlah tanggung jawab mereka, melainkan pemerintah. Meningkatkan kesadaran melalui program edukasi dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dapat membantu mengatasi masalah ini. Mengatasi perilaku ini memerlukan edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat sistem drainase

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan program pengelolaan sistem drainase yang cukup komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Akan tetapi dalam Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penanganan banjir di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penyelenggaraannya adalah Kondisi geografis wilayah kecamatan bangko yang memiliki dataran rendah dan air pasang sungai yang naik, membuat saluran drainase kurang efektif dalam mengalirkan air kesungai karena endapan lumpur air pasang sungai. Keterbatasan Anggaran yang dibutuhkan, Karena pembangunan sistem drainase untuk bangunan baru dan merehabilitasi drainase yang sudah rusak membutuhkan dana yang cukup besar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikutserta pada pemeliharaan sistem drainase dan masih banyak ditemui perilaku negatif masyarakat terhadap sistem drainase di kecamatan bangko seperti membuang sampah sembarangan disaluran drainase dan membiarkan saluran drainase tersumbat begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alliyu, A. A. (2023). Penanggulangannya Berdasarkan Uu Penataan Ruang Dan Ruu. *Bencana Banjir: Pengertian Penyebab, Dampak Dan Usaha Penanggulangannya Berdasarkan UU Penataan Ruang Dan RUU Cipta Kerja*, May.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung ) Oleh : Dewi Nurmalasari , Endang Irawan Supriyadi Abstrak Pendahuluan Dana Desa yang bersumber ditransfer melalui AP. 2*, 64–74.
- Rifqah Ramdhana Jufri. (2024). Efektivitas program kartu nelayan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di kecamatan nambo kabupaten banggai. *Meraja Journal*, 7(2), 15–27.